

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. P. Perlindungan. 1999. *Tentang Proses Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 2002. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Bandung.
- Aan Effendi, Freddy Poernomo, dan IG. NG. Indra S. Ranuh. 2007. *Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana. Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Angger Sigit dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Penjelasan*. Djambatan. Jakarta.
- _____. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Dessy Anwar. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abdi Tama. Surabaya.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- DY. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Pradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008*. Alfabeta. Bandung.
- Frans Hendra Winata. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien)*. Nusa Media. Bandung.
- Jimmy Jose Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Dan Arbitrase*. Visimedia. Jakarta.
- Lutfi I Nasoetion. 2002. *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*. Yayasan Akatiga. Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Mudakir Iskandar. 2019. *Panduan Mengurus Sertipikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuna Ilmu Poluler Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Otje Salman. 2004. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama. Jakarta.
- Pruitt, Dean G, dan Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rusmadi Murad. 2007. *Menyingkir Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 2013. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Dan Politik Agraria*. Karunika. Jakarta.

_____. 2011. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Suwarni dan Nunung Nurhidayah. 2018. *Membangun Trust Melalui Akuntabilitas Kinerja*. Intelegensia Media. Malang.

Takdir Rahmadi. 2012. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zalili Sailan. 2018. *Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat*. Intelegensia Media. Malang.

Jurnal

Nia Kurniati. 2016. *Mediasi Arbitrase Untuk Sengketa Tanah*. Jurnal Sosiohumaniora Volume 18 Nomor. 3. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

